

## ***ISU NEGATIF DALAM PEMILU 2019: DAMPAKNYA TERHADAP LEGITIMASI DAN SEGREGASI SOSIAL***

Wegik Prasetyo

*Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan  
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada*

*wegikprasetyo@ugm.ac.id*

### **Abstrak**

Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu dalam pemilu di Indonesia melalui berbagai media, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak Pemilihan Presiden 2014. Namun, dalam kasus Pemilihan Presiden 2019, target serangan isu negatif dalam pemilu tidak hanya ditujukan kepada kandidat namun juga kepada penyelenggara pemilu. Menggunakan kasus Pemilihan Presiden 2019, dan menggunakan analisa sentimen dengan Big Data, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana isu negatif yang mengarah pada berita palsu digunakan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Penulis menunjukkan bahwa ada narasi yang konsisten dibangun untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu menggunakan isu negatif bahkan jauh sebelum hari pemungutan suara. Walaupun jumlah berita palsu tidak sebanyak yang menyerang kandidat presiden di masa pra-pemilu, namun isu tersebut ada dan meningkat secara signifikan paska-pemilu. Artikel ini juga menunjukkan bahwa dampak dari isu negatif tidak hanya terkait penggiringan opini publik, namun juga berdampak merusak kehidupan demokrasi secara luas. Selain itu, kuatnya penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu turut berkontribusi melahirkan potensi segregasi sosial paska pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci: Berita Palsu, Deligitimasi Pemilu, Pemilihan Presiden, Segregasi Sosial

## **Pendahuluan**

Artikel ini membahas penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu, yaitu segala bentuk informasi yang sengaja maupun tidak sengaja dipalsukan yang digunakan untuk menyerang kandidat maupun penyelenggara, sebagai strategi dalam usaha melakukan delegitimasi di Pemilu 2019. Penulis mengeksplorasi bagaimana penyebaran isu negatif tidak hanya menargetkan kandidat presiden namun juga penyelenggara pemilu. Upaya ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi pola-pola penyebaran isu negatif di masa depan dan mengantisipasinya, tetapi juga untuk memahami perubahan dan keberlanjutan demokrasi elektoral Indonesia di tengah arus global yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan *post-truth era*.

Demokrasi elektoral paska 2014 di Indonesia ditandai dengan penggunaan berita palsu secara masif dimana kandidat menjadi target dari berita-berita palsu yang secara terang-terangan beredar di masyarakat (Utami, 2019). Isu utama yang digunakan dalam penggunaan berita palsu adalah isu identitas berbasis SARA terutama ras dan agama (Aspinall & Mietzner, 2014). Dalam konteks seperti itu, para kandidat maupun tim sukses sangat memahami bahwa penggunaan isu SARA yang dimanipulasi menggunakan berita palsu sangat efektif untuk memobilisasi suara dalam Pemilu (Bronstein, Pennycook, Bear, Rand, & Cannon, 2018). Sementara para pemilih, khususnya pemilih dengan orientasi keagamaan, dipandang lebih mengutamakan isu dan figur tokoh yang merepresentasikan agama tertentu daripada memilih untuk mendukung kandidat yang menawarkan programmatic politics. Beberapa literature telah menunjukkan bahwa terjadi penguatan populisme kanan sejak 2014 dan menjadi karakteristik dari pemilu di Indonesia (Hadiz, 2014, 2016, 2018).

Secara umum berita palsu dalam pemilu disebarkan melalui media online dan menargetkan kandidat. Media online, terutama media sosial,

menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan berita palsu dalam pemilu (Allcott & Gentzkow, 2017). Hal ini tidak terlepas dari algoritma media sosial yang membuat orang-orang dengan ketertarikan sejenis – termasuk orientasi politik – membentuk “*echo chambers*” atau “*filter bubbles*” di mana mereka akan terisolasi dari perspektif yang berlawanan (Dubois & Blank, 2018; Garrett, 2009). Target dari berita palsu tersebut sebagian besar adalah kandidat yang bertarung dalam pemilu (Allcott & Gentzkow, 2017; Howard, Bolsover, Kollanyi, Bradshaw, & Neudert, 2017). Berita palsu yang beredar melalui media online menunjukkan sisi negatif yang tidak benar dari kandidat dan mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih kandidat tersebut.

Untuk mengeksplorasi bagaimana isu negatif yang mengarah pada berita palsu menyebar dalam Pemilu dan menyerang kandidat presiden, penulis melakukan analisa big data twitter dalam rentang waktu 12-22 April 2019; lima hari menjelang pemilu dan lima hari paska pemilu. Hal ini menjadi penting untuk mengkonfirmasi penyebaran isu negatif dan mengaitkannya dengan fenomena politik nasional. Penulis berargumen bahwa isu negatif yang mengarah pada berita palsu juga menargetkan penyelenggara pemilu. Berita terkait surat suara tercoblos sebelum pemilu hingga berita tentang alasan kematian ratusan *electoral workers* paska pelaksanaan pemilu menunjukkan adanya konsistensi narasi yang hendak dibangun dari awal yakni delegitimasi penyelenggara pemilu. Dampak luas dari delegitimasi penyelenggara pemilu adalah delegitimasi hasil pemilu dan lahirnya potensi segregasi sosial.

Artikel ini disusun dalam empat bagian. Pertama, penulis menjelaskan metode pengambilan dan analisis data dalam *big data analytics*. Kedua, penulis membahas frekuensi, variasi konten, dan target atau sasaran dari isu negatif dan berita palsu. Ketiga, penulis membahas bagaimana dampak dari isu negatif dan berita palsu terhadap demokrasi terutama terkait legitimasi dan segregasi sosial. Terakhir, penulis menyimpulkan bahwa penyebaran isu negatif tidak memiliki efek destruktif di level struktur maupun level *grassroot*.

Diperlukan penguatan imunitas masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh masifnya penyebaran isu negatif.

### **Metode Pengambilan-Analisis Data dalam *Big Data Analytics***

Isu negatif yang beredar melalui sosial media terutama twitter mewarnai Pemilu 2019 mulai dari pra, saat, hingga paska pencoblosan. Target isu negatif itu adalah para kandidat presiden dan KPU. Penulis menggunakan data dari *Research Centre for Politics and Government* (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM melalui Laboratorium *Big Data Analytics* melakukan analisis big data tentang isu negatif dalam Pemilu 2019. Analisis big data ini memiliki keunggulan dalam hal luas cakupan penelitian serta dalam hal *volume, velocity, dan variety* data. Penulis menggunakan media sosial twitter untuk memetakan sebaran, variasi, dan target dari serangan isu negatif. Kata kunci yang digunakan dalam pengambilan data (*crawling*) dalam analisis ini adalah pengembangan dari riset PolGov dalam Pemilu 2019.

Metode pengambilan data menggunakan Application Programming Interface (API) di Twitter. Analisa Big Data mulai dari *crawling, cleaning, analysis*, hingga display data dilakukan di Laboratorium Big Data Analytics FISIPOL UGM. Analisa berupa analisa deskriptif berdasarkan sebaran geografis, frekuensi twit harian, frekuensi frasa, dan tagar yang digunakan. Data disajikan dalam bentuk *line graph, wordcloud, bar chart, pie chart*, dan *Geographic Information System* (GIS). Data diperoleh melalui pengambilan data di sosial media twitter yang dilakukan dalam rentang waktu 12 April 2019 hingga 22 April 2019. Jangkauan penelitian ini adalah para pengguna twitter di Indonesia dalam periode tersebut.

Penulis menggunakan beberapa kata kunci untuk *crawling* data di twitter baik dalam bentuk susunan kata maupun tagar. Kata kunci yang muncul selama periode pemantauan partisipatif dari penelitian yang dilakukan oleh Tim PolGov di Pemilu 2019 di Jawa Barat dan Maluku. Kata kunci tersebut kemudian dilakukan *exercise* untuk kebutuhan *crawling* data. Penulis

mengkategorisasikan seluruh susunan kata dan tagar dalam kategori target atau sasaran perbincangan isu negatif dalam Pemilu 2019. Susunan kata dan tagar dibagi menjadi tiga kategori yakni Paslon 01, Paslon 02, dan KPU. Berikut susunan kata dan tagar yang digunakan dalam *crawling*:

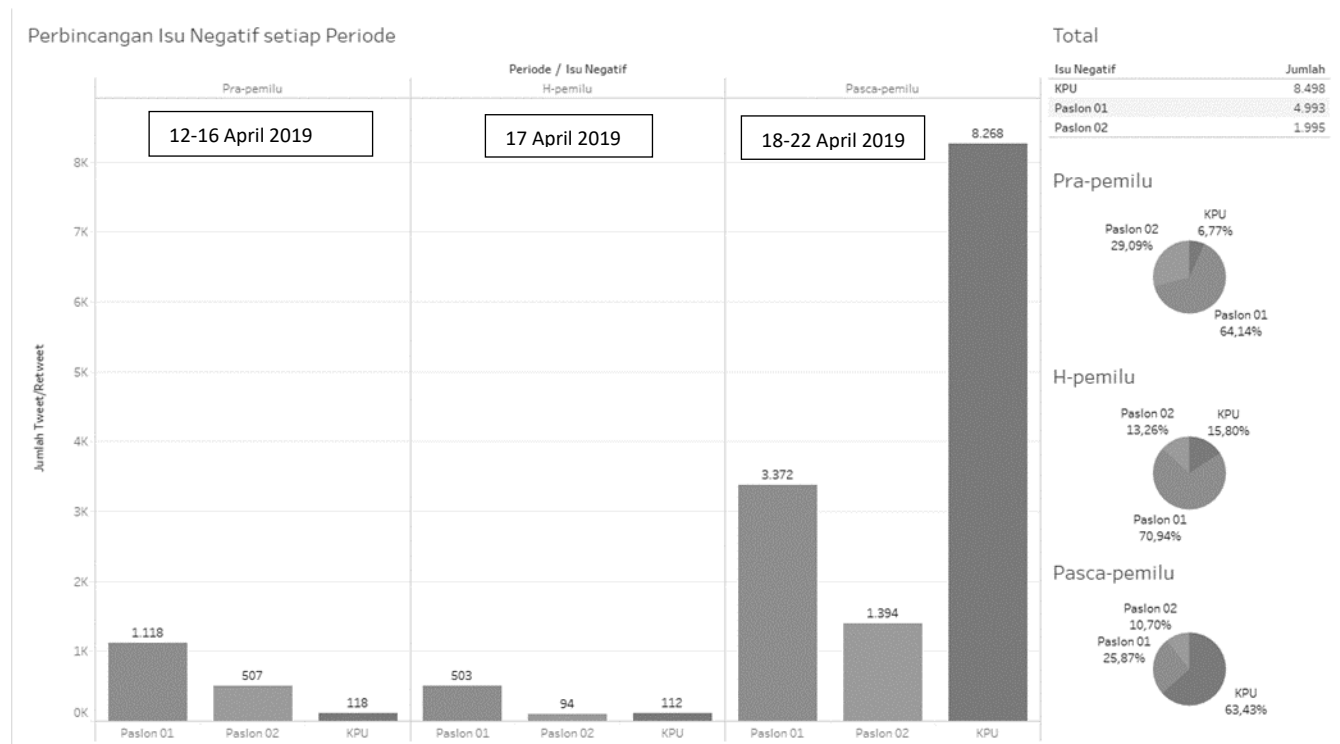
Paslon 1: Jokowi PKI, Jokowi kafir, Jokowi china, Jokowi cina, Jokowi kristen, Jokowi yahudi, Jokowi curang, Jokowi penipu, Jokowi bukan islam, Jokowi antek aseng, Jokowi antek asing, Jokowi larang adzan, Utang Pemerintah, Tol utang china, Konsultan Asing Jokowi, Jokowi melegalkan zina, Jokowi menghapus pendidikan agama, Jokowi melegalkan pernikahan sejenis, Jokowi melegalkan hubungan sejenis, #jokowicurang, #jokowiPKI, #jokowikafir, #jokowichina, #jokowicina, #jokowikristen, #jokowiaseng, #jokowiasing, #jokowicurang, #jokowipenipu, #Jokowiradikal

Paslon 2: Prabowo kafir, Prabowo china, Prabowo cina, Prabowo kristen, Prabowo yahudi, Prabowo bukan islam, Prabowo antek aseng, Prabowo antek asing, Prabowo Khilafah, Prabowo HTI, Prabowo Radikalis, Prabowo gak bisa sholat, Prabowo enggak bisa sholat, Prabowo tidak bisa sholat, Prabowo gak bisa ngaji, Prabowo enggak bisa ngaji, Prabowo enggak bisa wudhu, Prabowo tidak bisa wudhu, Prabowo delusi, #prabowokafir, #prabowochina, #prabowocina, #prabowokristen, #prabowoyahudi, #prabowobukanislam, #prabowoaseng, #prabowoasing, #prabowokhilafah, #prabowoHTI, #praboworadikal

KPU: KPU Bohong, KPU Manipulasi, KPU Curang, KPU Hoax, KPU Hoaks, KPU tidak netral, KPU error, KPU budeg, KPU buta, KPU tuli, KPU berpihak, KPU tersandera, KPU tidak netral, KPU bobol, KPU Cina, KPU China, Hack KPU, Wasit ikut main, Wasit kok ikut main, #KPUberpihak, #KPUtersandera, #KPUtidaknetral, #KPUbobol, #KPUcina, #KPUChina, #PemiluDiretas, #KPUdiretas, #KPUbudeg, #KPUbuta, #KPUtuli

## Perbincangan Isu Negatif dalam Pemilu 2019

Perbincangan terkait isu negatif dapat dimaknai dalam dua hal yakni: 1) tweet yang memang berbicara isu negatif, atau 2) tweet yang meng-counter isu negatif. Penulis mengelaborasi keseluruhan tweet yang terkait dengan isu negatif baik secara kuantitas maupun akun yang menyebarkan dan target isu tersebut. Secara umum, penulis menganalisa dan menyajikan data dalam tiga periode pemilu (pra pemilu, saat pelaksanaan, pasca pemilu) dan dalam kategori target isu (paslon 1, paslon 2, KPU).

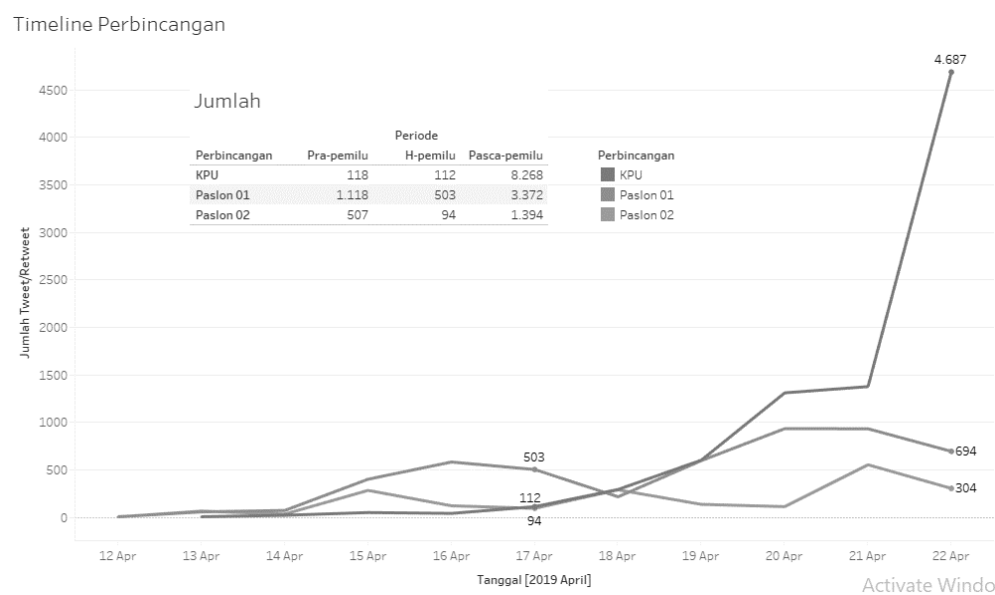


**Gambar 1. Perbincangan terkait Isu Negatif setiap Periode**

*Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM*

Selama periode pengambilan data, penulis berhasil mendeteksi 15.486 tweet yang mengindikasikan isu negatif dengan 8.498 (54,9%) tweet menargetkan KPU, 4.993 (32,2%) tweet menargetkan Paslon 01, dan 1.995 (12,9%) tweet menargetkan Paslon 02. Secara keseluruhan KPU menjadi target dari isu

negatif selama periode pengambilan data. Namun, jika dilihat secara lebih detail berdasarkan pembagian tiga periode (pra pemilu, hari-H pemilu, pasca pemilu), ada perubahan eskalasi isu negatif baik secara kuantitas maupun target atau sasaran. Dalam periode pra pemilu, penulis berhasil mendeteksi 1.743 twit yang mengindikasikan isu negatif dengan 1.118 (64,1%) twit menargetkan Paslon 01, 507 (29,1%) twit menargetkan Paslon 02, 118 (6,8%) twit menargetkan KPU. Dalam periode ini target utama isu negatif adalah kandidat dalam pemilu, terutama Paslon 01. Periode hari-H pemilu, tidak banyak perubahan eskalasi isu negatif dengan Paslon 01 yang masih menjadi target utama. Dari total 709 twit isu negatif, 503 (70,9%) twit menargetkan paslon 01, 94 (13,3%) twit menargetkan paslon 02, 112 (15,8%) menargetkan KPU. Periode pasca pemilu terjadi lonjakan kenaikan isu negatif dan perubahan target atau sasaran. Target isu negatif yang sebelum pemilu mengarah ke paslon, berubah menjadi KPU sebagai target utama di pasca pemilu. Penulis berhasil mendeteksi 13.034 twit yang mengindikasikan isu negatif dengan 3.372 (25,9%) twit yang menargetkan Paslon 01, 1394 (10,7%) twit yang menargetkan Paslon 02, dan 8268 (63,4%) twit yang menargetkan KPU.



**Gambar 2. Timeline Perbincangan terkait Isu Negatif**

Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM

Line graph di atas menunjukkan bahwa ada pergerakan yang dinamis dari isu negatif. Terlihat bahwa isu negatif yang sebelumnya menargetkan paslon mengalami penurunan di hari-H pemilu. Berbeda dengan KPU yang sebelumnya bukan target dari isu negatif, di hari-H pemilu mulai mengalami peningkatan jumlah isu negatif. Terlihat juga bahwa di sekitar tanggal 17 April dan 18 April 2019, terjadi persimpangan atau titik temu isu negatif yang menargetkan Paslon 01, Paslon 02, dan KPU. Persimpangan atau titik temu ini merupakan turning point terjadinya perubahan target isu negatif di mana isu negatif yang menargetkan Paslon turun sedangkan isu negatif yang menargetkan KPU naik. Dari line graph tersebut juga terlihat bahwa di tanggal 21 April dan 22 April 2019, terjadi peningkatan tajam isu negatif yang menargetkan KPU. Isu ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi isu utama yang secara signifikan menaikkan ekskalasi isu negatif.



**Gambar 3. Peta Isu Negatif untuk Paslon 01, Paslon 02, dan KPU**



Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM

Penulis mengidentifikasi lokasi akun atau lokasi di mana twit tersebut diunggah menggunakan fitur geographical coordinates [LONG, LAT] yang ada dalam Twitter. Namun fitur tersebut memiliki kelemahan. Deteksi lokasi hanya dapat dilakukan jika pemilik akun menampilkan lokasi di profil pengguna atau pengguna menandai lokasi saat mengunggah twitnya. Hal ini yang menyebabkan dari total 15.486 twit isu negatif, tidak semua dapat diidentifikasi lokasinya. Hanya 4.536 (29,3%) twit yang dapat dideteksi dengan dominasi sebaran di Pulau Jawa dengan 3.162 (69,7%) twit, Sumatera Utara dengan 211 (4,7%) twit, Sulawesi Selatan dengan 115 (2,5%) twit, Kalimantan Timur dengan 105 (2,3%) twit, dan Sumatera Barat dengan 101 (2,2%) twit. Penulis menyajikan dan mengkategorisasikan data dalam: 1) twit dengan respon terbanyak, 2) kata yang paling sering muncul.

Pra-pemilu (12 - 16 April 2019)					
Paslon 01		Paslon 02		KPU	
Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah
RT @faizalassegaf: Di dalam negeri pak @jokowi difitnah kafir, anti Islam & kriminalisasi ulama oleh kaum radikal & intoleran. Tap hariâ€¦	285	RT @Sandria_Irina: Saya Jawa Tionghoa , Saya Kristen ! Saya Non Muslim alias Kafir ! Saya NKRI ! Saya Panca Sila ! Saya Coblos No 02 ! Sayaâ€¦	248	RT @fallsky90: Uji materi UU Hitung Cepat di MK alhamdulillah di TOLAK !!! . Hitung Cepat menurut UU dilakukan setelah 2 jam TPS tutup. . lâ€¦	12
RT @Rinalni2: Jokowi di hina saya diam. Jokowi di fitnah saya diam. Jokowi di bilang pki saya juga diam. Jokowi dibilang antek asing sayaâ€¦	242	RT @albertino_baker: Saya Kristen & seumur hidup saya tidak pernah BERLINANG AIR MATA ketika mendengar ceramah yg diberikan seorang Muslimâ€¦	14	RT @muhamma87797215: @PartaiSocmed @KPU_ID Surat suara 7 kontainer, surat suara tercoblos di malaysia, kasus RS, akun” diretas adalah rentâ€¦	9
RT @Petra_Zayn: Jokowi di hina saya diam. Jokowi di fitnah saya diam. Jokowi di bilang pki saya juga diam. Jokowi dibilang antek asing sayaâ€¦	31	RT @faizalassegaf: Pasca Pencoblosan 17 April, lima hal ini bakal terjadi: 1. JKW - Amin & rakyat menang. 2. Prabowo ttp jd Capres Abadi.â€¦	10	RT @ainunnajib: Tidak hanya halaman C1 Plano hasil Pilpres, foto dan upload juga halaman yang sebelumnya, berisi angka-angka seperti berapaâ€¦	4
RT @nprazalcantara: Di dalam negeri @jokowi difitnah kafir, PKI,anti Islam & kriminalisasi ulama oleh kaum radikal & intoleran.Tap hari iâ€¦	30	RT @katakitaatweet: Akhirnya @prabowo siap jadi ANTEK ASENG karena visinya ingin mencontoh Tiongkok. Maklum karena @prabowo memang ketuâ€¦	8	RT @Dennysiregar7: Bohong mslh surat suara 7 kontainer. Bohong mslh oplas Ratna Sarumpaet Bohong mslh server KPU disetting. Dan gua hrs pâ€¦	3
RT @IreneViena: Media mainstream di bawah Jokowi selaku Produsen HOAX Terbesar RI Contoh Hoax dari media &gt;&gt; ttg peningkatan utang LN Riâ€¦	23	RT @arlex_wu: (1) Pikir ya tong.. kalau kalian nuding kt radikal, khilafah. Itu fifi, adik dan lawyernya Ahok, dtg ke prabowo silaturahmiâ€¦	8	RT @merdekadotcom: 4 Tersangka Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Segera Diadili. https://t.co/SXR70PAoWj	2

**Gambar 4. Twit dengan Respon Terbanyak dalam Periode Pra Pemilu (12-16 April 2019)**

Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM

H-pemilu (17 April 2019)

Paslon 01		Paslon 02		KPU	
Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah
RT @Rinalni2: Jokowi di hina saya diam. Jokowi di fitnah saya diam. Jokowi di bilang pki saya juga diam. Jokowi dibilang antek asing sayaâ€¦	151	RT @mertasetya87: @Fahrihamzah @prabowo @sandiuno Bodo amat ðŸ”.....teriakâ€¦ antek aseng...malah pakai yg dari aseng...udah ng hoax berkaliâ€¦.fitnaâ€¦	4	RT @detikcom: Prabowo menanggapi hasil quick count sementara yang dirilis beberapa lembaga survei dengan berbicara upaya penggiringan opiniâ€¦	30
RT @duwiry: Syalo0000 Pak @jokowi besok2 kalau ada yang menghalangi orang Kristen beribadah, dibelain ya Pak kalau memang sudah sesuai ketâ€¦	110	RT @EndjahH: Ini di TPS 57 Kelurahan Kayuringin Bekasi. Masih menang @prabowo maklum di tempat saya banyak Batak Kristen. https://t.co/ag7pâ€¦	4	RT @fallsky90: Uji materi UU Hitung Cepat di MK alhamdulillah di TOLAK !!! . Hitung Cepat menurut UU dilakukan setelah 2 jam TPS tutup. . lâ€¦	6
RT @IreneViena: Penipu ! Poltracking timses Jokowi https://t.co/QWIERN43Ba	45	RT @faizalasegaf: Pasca Pencoblosan 17 April, lima hal ini bakal terjadi: 1. JKW - Amin & rakyat menang. 2. Prabowo ttp jd Capres Abadi.â€¦	3	RT @nurinnn_: @yashadipura @prabowo @Sandi @PriyoBudiS @kwikkiangie @Garuda501 @AkunTofa @anonLokal @PEPESOfficial @RelawanProSandi @Angrâ€¦	3
RT @faizalasegaf: Di dalam negeri pak @jokowi difitnah kafir, anti Islam & kriminalisasi ulama oleh kaum radikal & intoleran. Tap hariâ€¦	12	RT @RomzDd: Alasan saya memilih Pak @prabowo & Pak @sandiuno bukan krn saya silau dgn kelebihan yg mereka punya. Wong saya jg ga begitu fahâ€¦	2	Polisi Telah Serahkan Tersangka Hoaks Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Kejaksaan	2
RT @arifahrudin: Jokowi di hina saya diam. Jokowi di fitnah saya diam. Jokowi di bilang pki saya juga diam. Jokowi dibilang antek asing saâ€¦	6	pernah ada cerita dr temen, ada lae2 batak kristen bilang mau pilih prabowo kenapa? "semenjak ada tol, gaada yg tambal ban lagi tempatku" wkwkwkwk nah ya intinya mah ya. sesuai visi misi coblos, gak sesuai cari yg sedikit..	1	@joked2019 Hoax Ratna Hoax 7 kontainer surat suara Hoax sdh tercoblos di selangor. Gusti mboten sare...02 nikmati kekalahanmu	1

**Gambar 5. Twit dengan Respon Terbanyak dalam Periode Hari-H Pemilu (17 April 2019)**

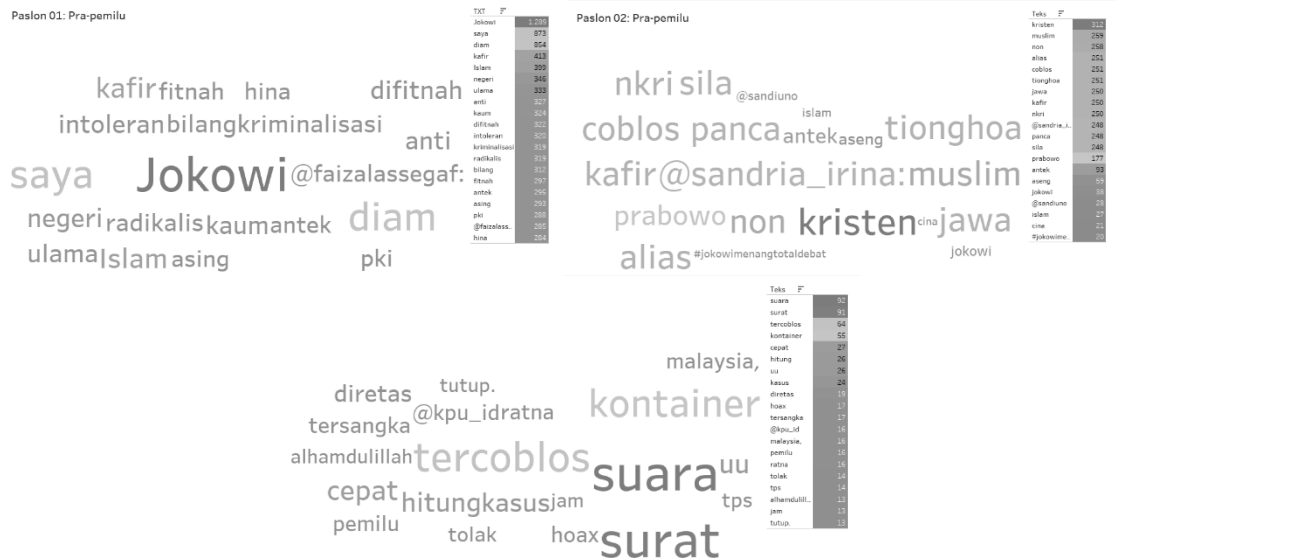
Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM

Pasca-pemilu (18 - 22 April 2019)

Paslon 01		Paslon 02		KPU	
Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah	Tweet Text	Jumlah
RT @IreneViena: Polri tindak tegas penyebar hoax pilpres Setuju ! Tolong polri buktikan pertama kali dengan menindak tegas Jokowi pelakuâ€¦	373	RT @IreneViena: Tinggalkan QC dengan segala kepaluannya Kita songsong penetapan hasil real count Semakin dekat kenyataan Prabowo 63% Jâ€¦	229	RT @IreneViena: Komisioner @KPU_ID memiliki motif tertentu mencurangi hasil pilpres 2019 Mereka tersandera kasus korupsi pengadaan Logistikâ€¦	590
RT @Jacksangpejuang: Selamat datang bawang putih DARI CHINA di negeri RAJA IMPOR no.1 Gak mau kalah Ama TKA nih bawang Benih nya pun maâ€¦	356	RT @IreneViena: Kemarahan Prabowo kemarin sudah benar Hanya pemimpin sontoloyo yg tdk marah melihat negara dirampok asing aseng antek ! Hâ€¦	185	RT @hnrwahid: Pembakar 13 Kotak(kardus)Surat Suara di 5 Penuh Jambi Ditangkap. Alhamdulillah.Kejahatan serius thd Pemilu spt ini,harus diuâ€¦	561
RT @IreneViena: Tinggalkan QC dengan segala kepaluannya Kita songsong penetapan hasil real count Semakin dekat kenyataan Prabowo 63% Jâ€¦	342	RT @IreneViena: Sumatera semua disapu bersih Prabowo Hny Babel dimenangkan Jokowi Maklum, mayoritas Cina di Babel Jawa seharusnya disapu bâ€¦	163	RT @do_ra_dong: Peristiwa ini sudah pantas untuk menyebut @KPU_ID maling suara Dan harus dipidana sesuai undang undang Begitu brutal KPUâ€¦	365
RT @IreneViena: Sumatera semua disapu bersih Prabowo Hny Babel dimenangkan Jokowi Maklum, mayoritas Cina di Babel Jawa seharusnya disapu bâ€¦	235	RT @KingPurwa: Gw mau tanya @BurhanMuhtadi - Prabowo Penculik - Prabowo Jumatan Dimana - Prabowo Gak Bisa Jadi Imam shalat - Prabowo Kafirâ€¦	97	RT @irwan_exely: TPS 093 Jatinegara (Bidara China) Lagi lagi data2 yg di Input di situs Resmi @KPU_ID hasil nya tidak sesuai dengan Cl... lâ€¦	275
RT @helmifelis: Viral di facebook Massa berdemo depan kedubes RI di Malaysia teriakan Jokowi curang, Prabowo Presiden Di KPU emak-emak jugâ€¦	213	RT @IreneViena: Perolehan suara Prabowo unggul di 30 propinsi, menang dengan selisih suara lebih 20% Tapi bisa dimanipulasi oleh situs kaâ€¦	70	RT @IreneViena: Silahkan saja KPU main api dg manipulasi hasil suara. Namun, jika nanti terbongkar, saya minta BPN tdk sekedar koreksi dataâ€¦	269

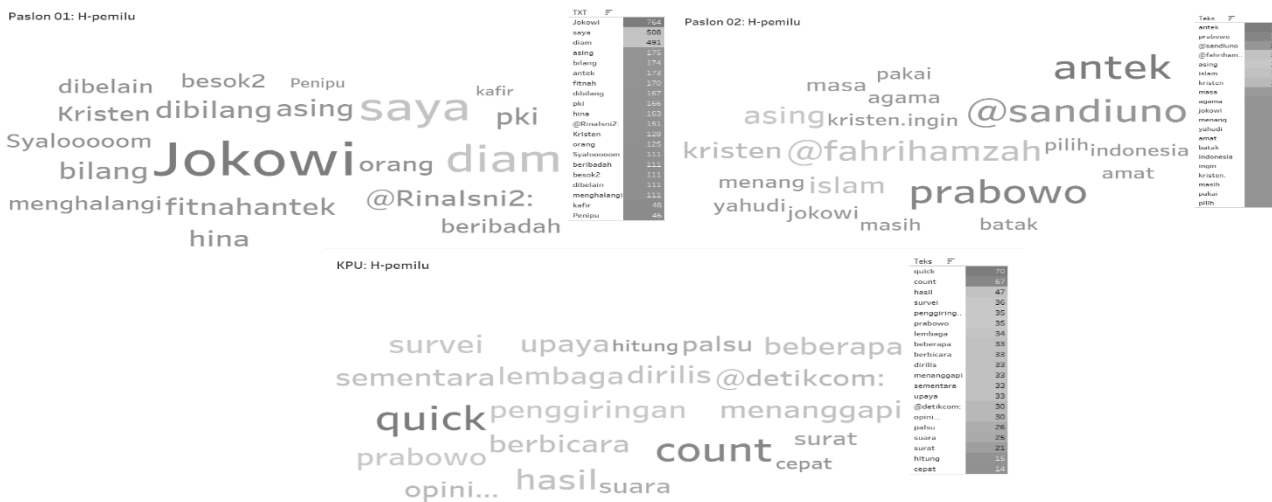
**Gambar 6. Twit dengan Respon Terbanyak dalam Periode Paska Pemilu (18-22 April 2019)**

Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM



**Gambar 7. Wordcloud / Kata yang paling sering muncul periode pra-pemilu terkait Paslon 01, Paslon 02, dan KPU**

Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM



**Gambar 8. Wordcloud / Kata yang paling sering muncul periode hari-H pemilu terkait Paslon 01, Paslon 02, dan KPU**

Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM



**Gambar 9. Wordcloud / Kata yang paling sering muncul periode paska pemilu terkait Paslon 01, Paslon 02, dan KPU**

*Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM*

Dari pemetaan twit terbanyak dan kata dengan instensitas kemunculan tinggi di sekitar aktor dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, semua aktor dalam pemilu baik Paslon 01, Paslon 02, maupun KPU menjadi target dari isu negatif. Kedua, masing-masing aktor memiliki karakter isu negatif yang berbeda satu sama lain. Tabel di bawah ini merupakan simplifikasi atau kategorisasi isu negatif yang terkait dengan masing-masing aktor. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada kesamaan isu negatif yang terkait dengan Paslon 01 dan Paslon 02 yakni isu identitas. Isu identitas tersebut meliputi etnis dan agama. Sedangkan isu negatif terkait KPU lebih ke ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Isu ketidakpercayaan terhadap KPU secara konsisten dibangun dari pra, saat, dan paska pemilu. Isu yang digulirkan mulai dari penyediaan logistik pemilu, netralitas penyelenggara, hingga permasalahan sistem kepemiluan.

Paslon 01	Paslon 02	KPU
<p>PRA PEMILU</p> <p>Respon/Diamnya 01 terhadap fitnah, Antek asing, PKI</p> <p>Isu identitas: Kafir, Islam</p> <p>Isu Kriminalisasi Ulama, Intoleran</p> <p>HARI-H</p> <p>Respon/Diamnya 01 terhadap fitnah, Antek asing, PKI</p> <p>Isu identitas: KPI, Kristen, Kafir</p> <p>Penipu</p> <p>PASKA PEMILU</p> <p>Penyebar Hoax Pilpres, Curang</p> <p>Impor Bawang</p> <p>Sumatra disapu bersih, Babel</p>	<p>PRA PEMILU</p> <p>Isu identitas: Kristen, islam, non, tionghoa, jawa, kafir</p> <p>Antek aseng, cina radikalis, khilafah</p> <p>HARI-H</p> <p>Antek Asing</p> <p>Batak Kristen</p> <p>Isu Identitas: islam, kristen, yahudi, agama</p> <p>PASKA PEMILU</p> <p>Sumatra disapu bersih, Babel</p> <p>Antek Aseng</p> <p>Hasil Pemilu, QC Palsu</p>	<p>PRA PEMILU</p> <p>Surat suara tercoblos, Malaysia</p> <p>Hitung cepat</p> <p>Server KPU diretas</p> <p>HARI-H</p> <p>Quick count, hitung cepat, hasil survey,</p> <p>Penggiringan opini</p> <p>Surat suara</p> <p>PASKA PEMILU</p> <p>Mencurangi, Kecurangan</p> <p>Tersandera</p> <p>Input tidak sesuai C1</p> <p>Manipulasi hasil suara</p> <p>Komisioner</p>

**Tabel 1. Perbedaan Isu Negatif yang Menargetkan Paslon 01, Paslon 02, KPU**

*Sumber: PolGov – Laboratorium Big Data Analytics Fisipol UGM*

Hasil analisis peta percakapan isu negatif dalam pemilu 2019 dapat diambil beberapa simpulan. Pertama, pemetaan isu negatif dalam pemilu 2019 selama periode 12 April hingga 22 April 2019, menghasilkan 15.486 twit yang terkait isu negatif yang terkait Paslon 01, Paslon 02, dan KPU. Kedua, tidak semua twit terkait isu negatif itu memiliki identitas lokasi, namun dari yang berhasil diidentifikasi lokasinya, twit terbanyak dari Jawa terutama Jawa Barat (1.031) dan Jakarta (856). Ketiga, sebaran isu negatif paling banyak ditemukan paska pemilu (13.030 twit) dibandingkan sebelum pemilu (1.743 twit). Pada hari pemungutan suara 17 April 2019 terdapat 709 twit terkait isu negatif. Keempat, semua aktor yang terlibat dalam pemilu yakni Paslon 01, Paslon 02, dan KPU menjadi target isu negatif. Isu negatif yang terkait KPU mencapai 8.498 twit (54,9%), Isu negatif yang terkait Paslon 01 mencapai 4.993 twit (32,3%), Isu negatif yang terkait Paslon 02 mencapai 1.995 twit (12,9%).

Sebelum pemilu, kedua paslon adalah sasaran utama isu negatif. Dibandingkan terhadap kedua paslon, isu negatif terhadap KPU adalah yang paling rendah dalam masa pra-pemilu. Frekuensi isu negatif terhadap kedua paslon cenderung turun pada hari-H pemilu, namun mengalami sedikit kenaikan terhadap KPU. Pasca pemungutan suara, terjadi peningkatan frekuensi sekitar 70 kali lipat terhadap KPU, dan sekitar 3 kali lipat terhadap kedua paslon. Dapat disimpulkan bahwa KPU dan kedua paslon presiden/wapres adalah sasaran utama itu negatif baik sebelum, saat dan setelah pemungutan suara.

### **Keterkaitan Isu Negatif dengan Legitimasi dan Segregasi Sosial**

Analisa isu negatif di pemilihan presiden 2019 menunjukkan bahwa KPU menjadi target baik saat pra pemilu, hari-H pemilu, maupun paska pemilu. Dalam konteks pra pemilu, setidaknya ada tiga isu negatif utama yang menargetkan KPU, yakni surat suara tercoblos, permasalahan hitung cepat,

dan server KPU yang diretas. Dalam konteks hari-h pemilu, setidaknya ada tiga isu utama yakni terkait dengan ketidakpercayaan terhadap *quick count*, hasil survey yang menggiring opini publik, dan permasalahan surat suara seperti ketersediaan A5 maupun isu surat suara dicoblos. Dalam konteks paska pemilu, setidaknya ada empat isu negatif utama yakni terkait kecurangan KPU, KPU yang tidak independen dan tersandera, input hasil pemilu yang tidak sesuai C1, hingga manipulasi hasil suara. Isu negatif yang menargetkan KPU baik di pra, saat, dan paska memiliki satu tujuan yakni mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Delegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu juga terlihat dari perubahan pola isu negatif. Target isu negatif yang menasar pasangan calon presiden-wakil presiden di periode pra-pemilu, mengalami pergeseran target menjadi KPU di paska pemilu. Hari H-Pemilu merupakan titik di mana terjadi penurunan eskalasi isu negatif, sehingga terjadi pertemuan dengan kenaikan isu negatif yang menargetkan KPU. Perubahan pola target isu negatif terhadap aktor juga menunjukkan perubahan pola isu. Namun, walau terjadi perubahan pola target dan pola isu, ada konsistensi yang dibangun di semua periode terkait KPU yakni delegitimasi. Delegitimasi ini tidak hanya untuk membangun narasi ketidakpercayaan terhadap KPU, namun juga ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.

Dampak dari persebaran isu negatif dan konsistensi usaha deligitimasi adalah terjadinya segregasi sosial di masyarakat. Salah satu tujuan awal dari dilaksanakannya perubahan mekanisme pemilu yang sebelumnya parsial kemudian dilakukan secara serentak adalah mencegah adanya konflik horizontal di level grassroot. Namun, konflik horizontal tetap terjadi bahkan paska pemilu telah selesai. Laporan penelitian PolGov (2019), menunjukkan bahwa segregasi sosial yang terjadi paska pemilu 2019, merupakan eksese negatif dari polarisasi selama proses pemilu berlangsung. Masyarakat terkotak-kotak pada orientasi politik dan cenderung memusuhi kelompok

masyarakat yang memiliki orientasi politik yang berbeba. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi dan eksistensi kohesi sosial.

## **Penutup**

Demokrasi menawarkan kebebasan individu dan kesetaraan dalam akses maupun interaksi sosial. Namun, perkembangan teknologi dan *post-truth era*, telah merubah pola interaksi masyarakat dan munculnya ketimpangan atas akses. Penyebaran isu negatif yang masif dalam Pemilihan Presiden 2019, tidak terlepas dari fenomena tersebut. Dalam artikel ini, penulis menunjukkan bahwa isu negatif tidak hanya menargetkan kandidat, namun juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ketiga aktor yakni pasangan calon 01, pasangan calon 02, dan KPU, semua menjadi target isu negatif dalam pemilu 2019.

Penulis juga mengkonfirmasi bahwa ada perubahan target utama isu negatif berbasis periode proses pemilu. Dalam periode pra-pemilu, target utama isu negatif adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan dalam periode paska pemilu, target utama isu negatif adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Salah satu tujuan dari isu negatif yang menargetkan KPU adalah deligitimasi penyelenggara pemilu yang berpotensi bermuara pada delegitimasi hasil pemilu. Penulis menemukan konsistensi wacana deligitimasi yang dibangun baik saat pra pemilu, hari pelaksanaan pemilu, hingga paska pemilu.

Dampak dari isu negatif dan usaha delegitimasi adalah munculnya segregasi sosial masyarakat. Hal itu juga tidak terlepas dari polarisasi selama proses pemilu. Segregasi sosial yang muncul dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi dan kohesi sosial. Secara keseluruhan, penulis percaya bahwa penyebaran isu negatif memiliki dampak destruktif yang tidak hanya berpengaruh di level struktur namun juga di level *grassroot*. Dibutuhkan penguatan dari sisi masyarakat, baik melalui literasi maupun pendidikan politik. Jika isu negatif seperti virus yang penyebarannya sulit



dikendalikan, maka salah satu cara untuk menangkalnya adalah dengan memperkuat imunitas masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of economic perspectives*, 31(2), 211-236.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 50 (3), 347-69.
- Bronstein, M. V., Pennycook, G., Bear, A., Rand, D. G., & Cannon, T. D. (2018). Belief in Fake News is Associated with Delusionality, Dogmatism, Religious Fundamentalism, and Reduced Analytic Thinking. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 108-117.
- Budi, A., Sukmajati, M., & Prasetyo, W. (2018). Kampanye Padat Modal oleh Calon Perseorangan: Studi Kasus Pilkada Kota Madiun 2018. Dalam M. Sukmajati, & A. Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (hal. 211-328). Jakarta: Bawaslu RI.
- Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media. *Information, Communication & Society*, 21(5), 729-745.
- Garrett, R. K. (2009). Echo chambers online?: Politically motivated selective exposure among Internet news users. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14(2), 265-285.
- Hadiz, V. R. (2014). A new Islamic populism and the contradictions of development. *Journal of Contemporary Asia*, 44(1), 125-143.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. New York: Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566-583.
- Howard, P. N., Bolsover, G., Kollanyi, B., Bradshaw, S., & Neudert, L.-M. (2017). Junk news and bots during the US election: What were Michigan

voters sharing over Twitter. *Computational Propaganda Research Project, Oxford Internet Institute, Data Memo.*

PolGov. (2019). Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2019. Unpublished Report.

Utami, P. (2019). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85-97.